



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH PANJANGREJO  
NOMOR : 3  
TAHUN : 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN PANJANGREJO  
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO  
TAHUN 2024



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH PAJANGREJO  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : LURAH PANJANGREJO,  
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
  16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
  21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
  22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

- (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
23. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
24. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2024 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan		
<b>a. Pendapatan Asli Kalurahan</b>	<b>Rp</b>	<b>227.306.500,00</b>
- Hasil Usaha Kalurahan / Pendapatan BUMKal	Rp	4.000.000,00
• Pengelolaan Tanas Kas Kalurahan	Rp	195.656.500,00
• Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp	10.800.000,00

• Hasil Bangunan	Rp	3.300.000,00
- Lain Lain Pendapatan Kalurahan Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	Rp	14.065.000,00
<b>b. Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp</b>	<b>5.138.389.293,00</b>
Dana Desa	Rp	1.442.707.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp	1.655.336.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	285.346.293,00
Bantuan Keuangan Kabupaten		
• Bantuan APBD Kabupaten	Rp	800.000.000,00
• Dikal	Rp.	125.000.000,00
• BKK	Rp.	510.000.000,00
• P2MK	Rp.	120.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi		
• Dana Reformasi Kalurahan	Rp.	100.000.000,00
c. Pendapatan Lain-lain		
• Bunga Bank	Rp	10.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.276.210.793,00</b>
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp.	2.416.351.793,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	1.913.431.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	542.123.498,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	436.590.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	174.800.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.483.296.437,00</b>
Surplus / (Defisit)	Rp.	(207.085.644,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	207.085.644,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan	Rp.	207.085.644,00
<b>Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Panjanglejo

Pada tanggal : 23 Desember 2024

LURAH PANJANGREJO,



MUDNYANA

Diundangkan di : Panjanglejo

Pada tanggal : 23 Desember 2024

CARIK PANJANGREJO,

JOKO IRIANTO

(Berita Kalurahan Panjanglejo Tahun 2024 Nomor 3)